

PENGUMUMAN
NOMOR: 875/S.1.3/SDM.01.2

TENTANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024, kami sampaikan bahwa Lembaga Administrasi Negara membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan pada unit organisasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan ketentuan dalam pengumuman ini.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; dan
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 234.1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Sertifikat Seleksi Kompetensi Dasar *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

B. Jenis Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Formasi, dan Unit Penempatan CPNS

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 (Lampiran XXXVIII tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara) Jenis Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Formasi dan Unit Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperuntukkan bagi CPNS Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Formasi dan Unit Penempatan CPNS Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2024

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Jenis Pengadaan			Unit Penempatan
				Umum	Khusus		
					C	D	
1.	Analisis Hukum Ahli Pertama	S-1 HUKUM	2	2			SEKRETARIAT UTAMA - BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, JAKARTA
2.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	7	7			LAN RI JAKARTA

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Jenis Pengadaan			Unit Penempatan	
				Umum	Khusus			
					C	D		K
3.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	1	1			PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, JATINANGOR	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	2	1		1	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH, SAMARINDA	
5.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	1	1			POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LAN BANDUNG	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	1	1			POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LAN MAKASSAR	

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Jenis Pengadaan			Unit Penempatan	
				Umum	Khusus			
					C	D		K
7.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	2				LAN RI JAKARTA
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	1	1				SEKRETARIAT UTAMA - BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, JAKARTA
9.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	1	1				PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, JATINANGOR
10.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	1	1				PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN, MAKASSAR
11.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	1	1				PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, ACEH
12.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 PSIKOLOGI	1	1				SEKRETARIAT UTAMA - BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM, JAKARTA

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Jenis Pengadaan			Unit Penempatan	
				Umum	Khusus			
					C	D		K
13.	Auditor Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	5	5			INSPEKTORAT, JAKARTA	
14.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	11	7	2	2	LAN RI JAKARTA	
15.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1			PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, JATINANGOR	
16.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1			PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN, MAKASSAR	
17.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1			PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH, SAMARINDA	
18.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1			POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LAN BANDUNG	
19.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	1			POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LAN MAKASSAR	
20.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	S-1 HUKUM	1	1			SEKRETARIAT UTAMA - BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, JAKARTA	

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Jenis Pengadaan			Unit Penempatan	
				Umum	Khusus			
					C	D		K
21.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 JURNALISTIK / D-IV DESAIN GRAFIS / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI	3	3			LAN RI JAKARTA	
22.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D-III KOMUNIKASI / D-III JURNALISTIK / D-III DESAIN GRAFIS / D-III SISTEM INFORMASI	2	2			LAN RI JAKARTA	
23.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 ILMU KOMPUTER/ S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	17	15	2		LAN RI JAKARTA	
24.	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	20	16		2	2	LAN RI JAKARTA
25.	Pustakawan Ahli Pertama	S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI/ D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	1				POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LAN JAKARTA
26.	Pustakawan Ahli Pertama	S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI/ D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	1				POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LAN BANDUNG
27.	Pustakawan Ahli Pertama	S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI/ D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	1				POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LAN MAKASSAR
28.	Statistisi Ahli Pertama	S-1 STATISTIKA / S-1 SAINS DATA	1	1				PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI, JAKARTA
29.	Widyaiswara Ahli Pertama	S-2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-2 SAstra INGGRIS	2	2				DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI - PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS DAN SOSIAL KULTURAL APARATUR SIPIL NEGARA - BALAI PELATIHAN BAHASA, JAKARTA
30.	Widyaiswara Ahli Pertama	S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-2 ADMINISTRASI PUBLIK / S-2 KEBIJAKAN PUBLIK / S-2 MANAJEMEN	14	12	2			LAN RI JAKARTA
31.	Widyaiswara Ahli Pertama	S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-2 ADMINISTRASI PUBLIK / S-2 KEBIJAKAN PUBLIK / S-2 MANAJEMEN	1	1				PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, JATINANGOR

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Jenis Pengadaan			Unit Penempatan	
				Umum	Khusus			
					C	D		K
32.	Widyaiswara Ahli Pertama	S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-2 ADMINISTRASI PUBLIK / S-2 KEBIJAKAN PUBLIK / S-2 MANAJEMEN	2	2			PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, ACEH	
33.	Widyaiswara Ahli Pertama	S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-2 ADMINISTRASI PUBLIK / S-2 KEBIJAKAN PUBLIK / S-2 MANAJEMEN	2	1		1	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH, SAMARINDA	
34.	Widyaiswara Ahli Pertama	S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-2 ADMINISTRASI PUBLIK / S-2 KEBIJAKAN PUBLIK / S-2 MANAJEMEN	4	4			PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN. MAKASSAR	
Total			114	100	6	2	6	

Keterangan Jenis Kebutuhan Khusus:

C = *Cumlaude*

D = Disabilitas

K = Putra/Putri Kalimantan

C. Deskripsi Tugas Jabatan dan Rentang Penghasilan

Informasi terkait dengan tugas jabatan dan rentang penghasilan yang akan diterima oleh CPNS Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Tugas Jabatan dan Penghasilan CPNS Lembaga Administrasi Negara
Tahun Anggaran 2024

No.	Jabatan	Formasi	Deskripsi Umum Tugas Pekerjaan	Rentang Penghasilan
1.	Analisis Hukum Ahli Pertama	CPNS	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 7,920,700
2.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	CPNS	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 7,920,700

No.	Jabatan	Formasi	Deskripsi Umum Tugas Pekerjaan	Rentang Penghasilan
3.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	CPNS	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 7,565,700
4.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	CPNS	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 7,920,700
5.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	CPNS	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi; potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan; manajemen sumber daya manusia aparatur	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 7,920,700
6.	Auditor Ahli Pertama	CPNS	Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 7,830,700
7.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	CPNS	Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi Pembelajaran	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 7,920,700
8.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	CPNS	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 7,705,700
9.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	CPNS	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 7,920,700
10.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	CPNS	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 6,602,100
11.	Pranata Komputer Ahli	CPNS	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata	Rp. 2,785,700 s.d.

No.	Jabatan	Formasi	Deskripsi Umum Tugas Pekerjaan	Rentang Penghasilan
	Pertama		kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	Rp. 7,920,700
12.	Pranata Komputer Terampil	CPNS	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 6,656,100
13.	Pustakawan Ahli Pertama	CPNS	Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 7,900,700
14.	Statistisi Ahli Pertama	CPNS	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik	Rp. 2,785,700 s.d. Rp. 7,920,700
15.	Widyaiswara Ahli Pertama	CPNS	Melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN	Rp. 2,903,600 s.d. Rp. 8,038,600

D. Persyaratan Umum Pelamar

Persyaratan umum bagi pelamar CPNS di lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2024 yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Merupakan lulusan Magister (S-2), Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV) atau Diploma III (D-III) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dengan skala 4,00 (empat koma nol);
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar memiliki ijazah (bukan surat keterangan LULUS) dari perguruan tinggi dalam negeri yang program studinya terakreditasi oleh

- Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi pada saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertera pada ijazah, sesuai persyaratan jabatan yang dilamar;
- b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan;
 9. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
 10. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan disampaikan saat pelamar dinyatakan lulus seleksi tahap akhir;
 11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA yang masih berlaku dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan saat pelamar dinyatakan lulus seleksi tahap akhir;
 12. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang masih berlaku dari dokter Rumah Sakit Pemerintah dan disampaikan saat pelamar dinyatakan lulus seleksi tahap akhir;
 13. Tidak bertato atau memiliki bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lain selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
 14. Bersedia ditempatkan di wilayah **Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara** dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 15. Bersedia mengabdikan pada Lembaga Administrasi Negara dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
 16. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai angka 15, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
 - b. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
 - c. Dalam hal pelamar merupakan PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi masa persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang; dan
 - d. Dalam hal Pelamar merupakan PPPK LAN, Pelamar wajib memenuhi masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun, mendapatkan persetujuan dari PPK dan hanya bisa mendaftar pada pengadaan CPNS Lembaga Administrasi Negara.

E. Persyaratan Khusus Pelamar Lulusan terbaik *Cumlaude*, Penyandang Disabilitas dan Putra/Putri Kalimantan

1. Bagi Pelamar **Lulusan terbaik/*cumlaude***:
 - a. Hanya diperuntukkan bagi pelamar yang memiliki jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, tidak termasuk Diploma Empat;
 - b. merupakan lulusan dengan predikat “Dengan Pujian” / *cumlaude* dengan IPK paling rendah 3,51 dari skala 4,00;
 - c. berasal dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul oleh instansi yang berwenang

- pada saat kelulusan, dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertera pada ijazah; dan
- d. bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan “Dengan Pujian” / *cumlaude* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Untuk Pelamar **penyandang disabilitas** wajib menyatakan status disabilitasnya yang dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 3. Pelamar **penyandang disabilitas** dapat melamar pada formasi umum dan formasi khusus selain formasi khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - b. Nilai ambang batas yang berlaku adalah nilai ambang batas pada formasi jabatan yang dilamar selain formasi khusus penyandang disabilitas;
 - c. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - d. Melengkapi persyaratan sebagaimana telah disebutkan pada angka 2 huruf a dan b.
 4. Untuk pelamar **Putra/Putri Kalimantan** wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat melamar.

F. Persyaratan Khusus Jabatan Tertentu

1. Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, wajib memiliki 1 (satu) dari 4 (empat) bidang keahlian TIK sebagai berikut:
 - a. *Frontend Developer*
 - 1) Memiliki pengalaman membangun atau mengembangkan sistem informasi berbasis web sebagai *frontend developer*; dan
 - 2) Memiliki kemampuan analisis dan dapat melakukan perbaikan pada gangguan pada sistem informasi.
 - b. *Backend Developer*
 - 1) Memiliki pengalaman membangun atau mengembangkan sistem informasi berbasis web sebagai *backend developer*; dan
 - 2) Memiliki kemampuan analisis dan dapat melakukan perbaikan pada gangguan pada sistem informasi.
 - c. *IT Cyber Security*
 - 1) Memiliki Pengalaman menjadi *IT Security / security analyst / blue team / red team / CSIRT*; dan
 - 2) Memiliki kemampuan mengoperasikan tool keamanan IT seperti *Firewall / Web Application Firewall / Antivirus / SIEM*.

- d. IT Infrastruktur
 - 1) Memiliki Pengalaman menjadi *network engineer / system engineer / backup engineer*, dan
 - 2) Memiliki pengalaman mengoperasikan *Server Virtual Machine / Operating System* berbasis Linux / *backup management system / perangkat switch dan access point*.
2. Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, wajib memiliki kemampuan dasar TIK sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengalaman menggunakan GIT (untuk pilihan poin nomor 1 di huruf a dan b);
 - b. Memiliki pengalaman menggunakan Tools Manajemen Database (untuk pilihan poin nomor 1 di huruf a dan b);
 - c. Memiliki kemampuan melakukan instalasi aplikasi;
 - d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan perangkat TIK dalam aspek lingkungan perkantoran.
3. Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, wajib melampirkan hasil pengalaman sesuai bidang keahlian yang dipilih di ketentuan poin nomor 1, dalam bentuk tautan aplikasi, *repository*, atau dokumen terkait.
4. Jabatan Pranata Komputer Terampil, wajib memiliki 1 (satu) dari 3 (tiga) bidang keahlian TIK sebagai berikut:
 - a. Memiliki Pengalaman membangun sistem informasi;
 - b. Memiliki pengalaman dalam *tools* keamanan informasi; dan
 - c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan *server / infrastruktur / IT Security*
5. Jabatan Pranata Komputer Terampil, wajib memiliki kemampuan dasar TIK sebagai berikut:
 - a. Memiliki kemampuan melakukan instalasi aplikasi; dan
 - b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan perangkat TIK dalam aspek lingkungan perkantoran.
6. Jabatan Pranata Komputer Terampil, wajib melampirkan pengalaman sesuai bidang keahlian yang dipilih di ketentuan poin nomor 4 dalam bentuk tautan aplikasi atau dokumen pendukung lainnya.

G. Tata Cara Pendaftaran

1. Pelamar mengunggah hasil *scan* dokumen persyaratan melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:
 - a. Surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara, yang diketik menggunakan komputer, dicetak diatas kertas yang dibubuhi materai elektronik (e-materai) Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pulpen/*ballpoint* bertinta hitam/biru (surat lamaran dibuat dengan menggunakan format terlampir);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - c. Ijazah Asli dan Sertifikat Akreditasi Program Studi;
 - d. Transkrip Nilai Ijazah asli;

- e. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - f. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik menggunakan computer, dicetak diatas kertas yang dibubuhi materai elektronik (e-materai) Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pulpen/ *ballpoint* bertinta hitam/biru (surat pernyataan data diri dibuat dengan menggunakan format terlampir);
 - g. Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya bagi pelamar penyandang disabilitas; dan
 - h. Dokumen lain yang dipersyaratkan pada jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf F.
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung dilakukan secara *online* melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Pendudukan (KTP); dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
 3. Setiap pelamar hanya diperkenankan untuk melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.
 4. Panitia seleksi hanya menerima pendaftaran secara *online*.
 5. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://lan.go.id>.

H. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi
 - a. Tahapan seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi persyaratan administrasi yang disampaikan oleh pelamar;
 - b. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://lan.go.id>, untuk selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - c. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) secara *online* melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/>; dan
 - d. Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) harus dibawa selama peserta mengikuti proses seleksi penerimaan CPNS tahun 2024.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

SKD diselenggarakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dengan nilai ambang batas (*passing grade*) untuk masing-masing kategori pelamar sebagai berikut:

Tabel 3
Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar CPNS

Kategori pelamar	Nilai Kumulatif	TKP	TIU	TWK
Kebutuhan Umum	Paling sedikit 311	166	80	65
Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan	Paling sedikit 311	166	80	65
Kebutuhan Khusus Lulusan terbaik/ <i>Cumlaude</i>	Paling sedikit 311		85	
Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas	Paling sedikit 286		60	

Keterangan:

- TKP = Tes Karakteristik Pribadi
 TIU = Tes Intelegensi Umum
 TWK = Tes Wawasan Kebangsaan

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Jumlah pelamar yang mengikuti SKB berjumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan dan diurutkan berdasarkan peringkat nilai SKD.

Adapun materi SKB terdiri dari:

Tabel 4
Materi dan Nilai Ambang Batas SKB CPNS

No.	Jenis Tes	Bobot	Nilai Ambang Batas	Keterangan
1.	Substansi Jabatan menggunakan CAT	50%	Tidak ada	Tidak Menggugurkan
2.	Psikotes	20%	Minimal hasil rekomendasi adalah "Dipertimbangkan", dimana kriteria rekomendasi sebagai berikut: a. Disarankan; b. Masih Dapat Disarankan; c. Dipertimbangkan; d. Tidak Disarankan.	Harus memenuhi nilai ambang batas
3.	Praktik Kerja	20%	Nilai Minimal 75	Harus memenuhi nilai ambang batas
4.	Wawancara	10%	Tidak ada	Tidak Menggugurkan

Keterangan:

Jenis/bentuk/materi Praktik Kerja Pada Seleksi PNS akan disampaikan pada pengumuman Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

4. Pengumuman Hasil Seleksi

Seluruh hasil pelaksanaan seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Instansi CPNS Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2024 dan diumumkan melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://lan.go.id>.

I. Jadwal Seleksi Pengadaan

Jadwal seleksi pengadaan CPNS di lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS
Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2024

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Seleksi https://lan.go.id	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi secara <i>Online</i> https://sscasn.bkn.go.id/	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD CPNS T.A. 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan Data Final Hasil Seleksi Administrasi	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan Data Final Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	26 s.d. 28 November 2024
19.	Pengumuman Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024

No.	Kegiatan	Tanggal
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman kelulusan akhir	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah hasil kelulusan akhir	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah hasil kelulusan akhir	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada pengumuman akhir	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

J. Ketentuan Penggunaan Nilai SKD Pada Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023

Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melamar melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
2. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
3. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda dari seleksi tahun anggaran 2023;
4. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda dari seleksi tahun anggaran 2024;
5. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
6. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024;
7. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024; dan
8. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.

K. Pemanfaatan Sertifikat Seleksi Kompetensi Dasar CAT BKN

Bagi pelamar yang telah melaksanakan SKD CAT BKN pada periode tahun anggaran 2023 dapat menggunakan nilai SKD periode sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar merupakan peserta SKD pada pengadaan PNS tahun anggaran 2023 dan telah mengunduh sertifikat SKD CAT BKN pada *website* resmi yang telah ditentukan oleh BKN;

2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun anggaran 2024, dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023 pada SSCASN;
3. Validasi Sertifikat SKD CAT BKN menggunakan aplikasi Validator SertifiCAT yang dibuat oleh BKN;
4. Sertifikat SKD CAT BKN berlaku sampai dengan seleksi Pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya;
5. Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti SKD pada periode berikutnya, maka hasil nilai SKD pada Sertifikat SKD CAT BKN sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
6. Pelamar dilarang memalsukan atau memodifikasi Sertifikat SKD CAT BKN. Bagi peserta yang melakukan modifikasi data dan/atau memalsukan Sertifikat SKD CAT BKN akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Lain-Lain

1. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah paling lambat 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil lulus seleksi administrasi apabila terjadi kesalahan verifikasi administrasi oleh panitia sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CPNS Lembaga Administrasi Negara akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah oleh pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
3. Lokasi tempat pelaksanaan seleksi dengan menggunakan CAT akan diumumkan melalui melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://lan.go.id>. Pelamar wajib untuk membuka situs website tersebut secara rutin/periodik.
4. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Pelaksanaan jadwal, lokasi dan peserta SKB diumumkan secara resmi melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://lan.go.id>.
6. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan CPNS Lembaga Administrasi Negara Tahun 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://lan.go.id>.
7. Pelamar wajib untuk mengakses situs sebagaimana dimaksud pada angka 6 secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi pengadaan CPNS Lembaga Administrasi Negara tahun anggaran 2024.
8. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CPNS Lembaga Administrasi Negara tidak bertanggung jawab apabila pelamar tidak menerima informasi dikarenakan lalai untuk mengakses informasi yang terdapat di situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://lan.go.id> tentang informasi pengadaan CPNS Lembaga Administrasi Negara tahun anggaran 2024.
9. Apabila terdapat pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi CPNS Lembaga Administrasi Negara, kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CPNS Lembaga Administrasi Negara dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik

dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. Pelamar yang mengundurkan diri mendapatkan sanksi tidak boleh mendaftar seleksi CPNS pada periode berikutnya.

10. Pelamar dihimbau untuk tidak mempercayai apabila terdapat orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Kelulusan pelamar adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada pelamar, keluarga, atau pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pengadaan CPNS Lembaga Administrasi Negara. Apabila diketahui bahwa pelamar, keluarga, atau pihak lain akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pelamar akan digugurkan kelulusannya.
12. Apabila dalam pelaksanaan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir ditemukan keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CPNS Lembaga Administrasi Negara dapat menggugurkan status CPNS yang bersangkutan.
13. Pendaftaran dan seluruh tahap seleksi tidak dipungut biaya/gratis.
14. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CPNS Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2024 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
15. Pengaduan, pelayanan dan penjelasan informasi terkait dengan Pengadaan CPNS Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2024 dapat diakses melalui *Helpdesk* Telp: 021-3868201 dan 021-3868203 (ext. 181 dan 203), dengan waktu pelayanan pada hari kerja Senin-Jumat jam 08.00 -16.00 WIB.

Jakarta, 16 Agustus 2024

Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CPNS
Lembaga Administrasi Negara,

}{ttd}

M. Yusuf Gunawan Idris

SURAT LAMARAN

(kota), (tanggal) (bulan) 2024

**YTH.
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DI
JAKARTA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor KTP :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Unit Penempatan yang
dilamar :
Alamat domisili saat ini :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :
Alamat *e-mail* :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Scan* Surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara, yang diketik menggunakan komputer, dicetak diatas kertas yang dibubuhi materai elektronik (e-materai) Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pulpen/ *ballpoint* bertinta hitam/biru;
2. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
3. *Scan* Ijazah Asli dan Sertifikat Akreditasi Program Studi;
4. *Scan* Transkrip Nilai Ijazah Asli;
5. Pas foto ukuran 4x6 menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
6. *Scan* Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik menggunakan computer, dicetak diatas kertas yang dibubuhi materai elektronik (e-materai) Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pulpen/ *ballpoint* bertinta hitam/biru;

7. Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya **bagi pelamar penyandang disabilitas**;
8. Dokumen lain yang dipersyaratkan pada jabatan tertentu.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS di Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2024.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(kota), (tanggal) (bulan) 2024
Yang membuat pernyataan,

E_Materai Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

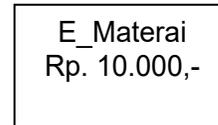
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor KTP :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Unit Penempatan yang dilamar :
Alamat domisili saat ini :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :
Alamat *e-mail* :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
7. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
9. Tidak bertato atau memiliki bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lain selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.

10. Bersedia ditempatkan di wilayah **Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara** dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Bersedia mengabdikan pada Lembaga Administrasi Negara dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

(kota), (tanggal) (bulan) 2024
Yang membuat pernyataan,



(Nama Lengkap)